

# GEOMEDIA

Majalah Ilmiah & Informasi Kegeografian

Kampus Karangmalang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY )

Mobilitas Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati

Kota Semarang

Oleh: Puji Hardati

Kajian Erosi pada DAS Cisanggarung Bagian Hulu di Kabupaten Kuningan

Jawa Barat

Oleh: Muhammad Nursa'ban

Aksesibilitas dan Perempuan dalam Kegiatan Publik

Oleh: Hastuti

Strategi Pembelajaran Penginderaan Jauh sebagai Pencitra Permukaan Bumi

Berbasis Kompetensi

Oleh: Bambang Syaeful Hadi

Menyikapi Bencana Alam di Indonesia

Oleh: Sugiharyanto

Analisis Spasial untuk Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Terkait

Lingkungan

Oleh: Dyah Respati Suryo Sumunar

Pendekatan Geomorfologi untuk Penentuan Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Di Kabupaten Bantul Bagian Selatan

Oleh: Arif Ashari

Kajian Ekologi Bentanglahan Pesisir Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bantul

Oleh: Nurul Khotimah

DITERBITKAN OLEH JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



# GEOMEDIA

Kampus Karangmalang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY )

Mobilitas Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati  
Kota Semarang  
Oleh: Puji Hardati

Kajian Erosi pada DAS Cisanggarung Bagian Hulu di Kabupaten Kuningan  
Jawa Barat  
Oleh: Muhammad Nursa'ban

Aksesibilitas dan Perempuan dalam Kegiatan Publik  
Oleh: Hastuti

Strategi Pembelajaran Penginderaan Jauh sebagai Pencitra Permukaan Bumi  
Berbasis Kompetensi  
Oleh: Bambang Syaeful Hadi

Menyikapi Bencana Alam di Indonesia  
Oleh: Sugiharyanto

Analisis Spasial untuk Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Terkait  
Lingkungan  
Oleh: Dyah Respati Suryo Sumunar

Pendekatan Geomorfologi untuk Penentuan Kawasan Rawan Bencana Tsunami  
Di Kabupaten Bantul Bagian Selatan  
Oleh: Arif Ashari

Kajian Ekologi Bentanglahan Pesisir Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bantul  
Oleh: Nurul Khotimah

DITERBITKAN OLEH JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

# **GEOMEDIA**

Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian

Terbit 2 kali setahun pada edisi Mei dan November  
Berisi Kajian Ilmiah dan Hasil Penelitian tentang Kegeografian

## **Penerbit**

Program Studi Pendidikan Geografi UNY

## **Penanggung Jawab**

Ketua Jurusan Pendidikan Geografi

## **Dewan Redaksi**

Nurhadi

Gunardo Robertus B.

Suparmini

## **Sekretaris Redaksi**

Dyah Respati

## **Penyunting Ahli**

A.J. Suharjo (Universitas Gadjah Mada)

Saidiharjo (Universitas Negeri Yogyakarta)

Muhsinatun Siasah Masruri (Universitas Negeri Yogyakarta)

Didik Taryana (Universitas Negeri Malang)

Pudji Hardati (Universitas Negeri Semarang)

## **Setting dan Lay Out**

Bambang Syaiful Hadi

Muhammad Nursa'ban

## **Tata Usaha dan Sirkulasi**

Agung Yulianto

## **Alamat Redaksi**

Program Studi Pendidikan Geografi FISE UNY

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 ext. 386

e-mail: Geografi\_UNY@Plasa.com

## DAFTAR ISI

Kata Peng .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Mobilitas Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Geografi Oleh: Puji Hardati .....	1-16
2. Kajian Erosi pada DAS Cisanggarung Bagian Hulu di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Oleh: Muhammad Nursa'ban .....	17-34
3. Aksesibilitas dan Perempuan dalam Kegiatan Publik Oleh: Hastuti .....	35-46
4. Strategi Pembelajaran Penginderaan Jauh sebagai Pencitra Permukaan Bumi Berbasis Kompetensi Oleh: Bambang Syaeful Hadi .....	47-60
5. Menyikapi Bencana Alam di Indonesia Oleh: Sugiharyanto .....	61-72
6. Analisis Spasial untuk Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Terkait Lingkungan Oleh: Dyah Respati Suryo Sumunar .....	73-84
7. Pendekatan Geomorfologi untuk Penentuan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Kabupaten Bantul Bagian Selatan Oleh: Arif Ashari .....	85-102
8. Kajian Ekologi Bentanglahan Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul Oleh: Nurul Khotimah .....	103-112
Biodata Penulis .....	113

## KAJIAN EKOLOGI BENTANGLAHAN PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Nurul Khotimah

Jurusan Pendidikan Geografi, FISE UNY

### Abstrak

*Sumberdaya pesisir merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumberdaya pesisir mampu mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.*

*Kabupaten Bantul mempunyai lahan pesisir terbentang dari Parangtritis hingga ke Pandasimo dengan karakteristik pantai yang khas. Beberapa bentuklahan ada di kawasan ini, antara lain bentuklahan eolin, bentuklahan fluvial, bentuklahan marine, dan bentuklahan fluviomarine yang perlu dikaji secara ekologi guna menjamin keberlanjutan dari sumberdaya tersebut. Pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.*

*Kata Kunci: Ekologi bentanglahan, pesisir, berbasis masyarakat*

### **Pendahuluan**

Wilayah pesisir merupakan sumberdaya potensial di Indonesia. Sumberdaya ini sangat besar dan didukung oleh adanya garis pantai sepanjang  $\pm 81.000$  km (Dahuri et al., 2001). Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay R. and J. Alder, 1999). Transisi daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk berbagai ekosistem yang produktif dan memberikan nilai ekonomi tinggi bagi manusia. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan maka nilai wilayah pesisir semakin tinggi pula. Konsekuensi dari pemanfaatan wilayah

pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik kepentingan.

Hampir semua kota besar di Indonesia berada di wilayah pesisir dan sebagian kota ini mulai melakukan reklamasi lahan di tepi pantai. Banyak pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat mengambil tempat di kawasan pesisir (seperti budidaya perikanan, lokasi resort wisata, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, dan reklamasi lahan untuk perluasan kota), sehingga banyak *stakeholder* yang berkepentingan untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Pertumbuhan populasi penduduk Indonesia yang hidup di wilayah pesisir meningkat pesat sehingga mendorong kebutuhan untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir yang semakin besar. Diperkirakan 60% dari populasi penduduk Indonesia bermukim di pesisir, dan 80% dari lokasi industri mengambil tempat di wilayah pesisir (Dahuri et al., 1998).

Oleh karena itu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir sering muncul konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya di wilayah pesisir yang pembangunannya pesat dan kaya sumberdaya. Secara umum pihak yang berkepentingan ini dapat dikategorikan dalam sektor pertanian/perikanan, pariwisata, pertambangan, perhubungan laut, industri maritim, dan konservasi. Sektor pekerjaan umum terkait dalam perlindungan fisik pantai dari erosi.

Perencanaan yang baik untuk penataan ruang wilayah harus ditinjau dari berbagai aspek terutama aspek-aspek yang sifatnya *given* seperti iklim, hidrologi, geologi, dan bentuklahan, karena aspek-aspek tersebut merupakan elemen-elemen ekosistem yang sangat sulit diperbaiki jika sudah mengalami degradasi atau perusakan. Disamping itu pemanfaatan ruang pada suatu lokasi yang tidak tepat secara ekosistem akan tidak efisien, dan bisa mendatangkan kendala yang sulit diatasi, seperti banjir, longsor, dan lain-lain.

## **Karakteristik Pesisir Kabupaten Bantul**

### **A. Fisiografi**

Wilayah pesisir Kabupaten Bantul merupakan dataran alluvial Merapi dari material Gunung Merapi serta perbukitan struktural Formasi Nglanggran di sebelah Timur dan Formasi Sentolo di bagian Barat. Sebagian besar perbukitan struktural mempunyai tanah yang bersolum tipis dan

ditempati oleh pertanian lahan kering. Terdapat juga dataran fluvial dan fluviomarine. Dataran fluvial sebagian besar merupakan daerah budidaya, permukiman, dan pertanian lahan basah (Sugiharyanto, dkk, 2009).

## B. Tanah

Lahan pantai di wilayah pesisir Kabupaten Bantul memiliki sifat agroklimat yang spesifik, yaitu tanah berpasir yang memiliki tingkat porositas rendah dan tingkat drainase tinggi sehingga mudah meloloskan air dan kesuburan tanahnya kurang. Didukung adanya kecepatan angin yang tinggi maka lahan pantai sulit dikelola secara maksimal untuk dijadikan lahan pertanian. Keterbatasan secara ekologis tersebut merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi untuk mengembangkan lahan pantai.

## C. Permasalahan Pesisir

Pengelolaan sumberdaya pesisir menjadi semakin penting akibat proses dinamika wilayah pesisir yang dipengaruhi faktor alam, kegiatan manusia, dan kombinasi keduanya. Menurut Ongkosongo (2004), beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya pengelolaan sumberdaya pesisir, antara lain:

1. Penataan ruang yang tidak berbasis kesesuaian lahan.
2. Kepemilikan lahan yang tidak diatur dengan baik.
3. Penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya mineral, energi dan sumberdaya air.
4. Penurunan kualitas dan kemusnahan potensi atau cadangan keanekaragaman sumberdaya hayati (ekosistem di wilayah pantai).
5. Penurunan kesehatan lingkungan.
6. Bencana alam.
7. Permasalahan lain, terkait perubahan iklim dan pemanasan global.

Beberapa permasalahan diatas merupakan bagian permasalahan kunci dari kerusakan dan degradasi ekosistem, sumberdaya, dan biofisik kawasan pesisir.

## D. Ekologi Bentanglahan

Ekologi bentanglahan pertama kali diperkenalkan oleh geografer dari Jerman bernama Carl Troll yang menggunakan istilah *geo-ecology*. Ekologi

bentanglahan dipandang sebagai perkawinan antara geografi dengan biologi (ecology). Ekologi bentanglahan merupakan disiplin ilmu yang meletakkan dasar geosfer sebagai kunci dari lingkungan komunitas vegetasi, hewan, dan manusia.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain: a) *Phytocentric approach* yang menekankan pada hubungan timbal balik antara bentanglahan dengan vegetasi, b) *Zoocentric approach* yang menekankan pada hubungan timbal balik antara bentanglahan dengan komunitas hewan, dan c) *Anthropocentric approach* yang menekankan pada responsibilitas dan hubungan antara manusia dengan bentanglahan. (Worosuprojo, 2007). Pendekatan phytocentric dengan zoocentric disebut sebagai pendekatan biosentrik (*biocentric approach*).

Pesisir Kabupaten Bantul membentuk beberapa sistem ekologi atau sering disebut ekosistem yang mempunyai karakteristik khas, yang dilatarbelakangi oleh bentuklahan dan kehidupan masyarakat setempat seperti yang terlihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, maka kawasan pesisir Kabupaten Bantul terbagi atas 5 (lima) ekosistem, yaitu Ekosistem Pesisir, Ekosistem Gumuk Pasir Aktif, Ekosistem Gumuk Pasir Pasif, Ekosistem Estuari, dan Ekosistem Rawa Belakang.

#### E. Tipologi Pesisir Kabupaten Bantul

Tipologi pesisir Kabupaten Bantul yang dominan adalah tipe pesisir pengendapan laut dan beberapa tempat seperti di kanan kiri sungai merupakan tipe pesisir pengendapan darat (Khakim, dkk., 2008). Tipe pesisir pengendapan laut bercirikan relief dataran hingga berombak, mempunyai materi pasir, dan prosesnya terdiri dari proses marine (gelombang) untuk wilayah yang dekat dengan laut dan proses aeolian (angin) pada daerah yang lebih ke arah darat. Kenampakan yang mudah untuk dikenali di lapangan adalah kenampakan gisik pantai untuk proses marine dan gumuk pasir untuk proses aeolian. Tipe pesisir pengendapan darat dicirikan oleh relief dataran hingga berombak, dengan bentuk berupa lumpur (lembek), dan proses genesisnya berupa proses fluvial atau aliran sungai. Sebaran tipologi pesisir kaitannya dengan potensi kearifan lokal masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Bantul disajikan dalam Tabel 2 tentang Tipologi Pesisir Kabupaten Bantul.



Tabel 1. Tipe Ekosistem Kawasan Pesisir Kabupaten Bantul

No	Ekosistem	Wilayah dan Nama Pantai	Fungsi Lahan	Tipe Mata Pencaharian Masyarakat
1.	Pesisir	Pantai Parangtritis	Wisata pantai, wisata religi, permukiman	Jasa wisata (penginapan, kamar mandi, toko cinderamata, tempat parkir, guide)
		Pantai Parangkusumo	Wisata pantai, wisata religi, permukiman	Jasa wisata (penginapan, kamar mandi, toko cinderamata, tempat parkir, guide)
		Pantai Depok	Wisata pantai, tempat pelelangan ikan, wisata kuliner	Nelayan, rumah makan ikan laut
		Pantai Samas	Wisata pantai, permukiman	Nelayan, jasa wisata (penginapan, kamar mandi, tempat parkir)
		Pantai Kuwaru	Wisata pantai, permukiman, wisata kuliner	Jasa wisata (penginapan, kamar mandi, toko cinderamata, tempat parkir, guide)
		Pantai Pandansimo dan Pandan Segegek	Wisata pantai, wisata religi, permukiman	Nelayan, jasa wisata (penginapan, kamar mandi, tempat parkir)
2.	Estuari	Sekitar Muara Sungai Opak, Laguna	Tegalan, wisata Air	Pertanian lahan pasang surut
		Sekitar Muara Sungai Progo	Tegalan	Pertanian lahan pasang surut, penambang pasir dan batu
3.	Gumuk Pasir Aktif	Gumuk Pasir Parangtritis	-	-
4.	Gumuk Pasir Pasif	Gumuk Pasir sepanjang Pantai Samas sampai dengan Pandasimo	Lahan pertanian pantai (jambu mete, semangka, melon)	Petani lahan pasir
5.	Rawa Belakang	Depok sampai dengan Sanden	Lahan pertanian rawa dengan sistem surjan (bawang merah)	Petani bawang merah

Sumber: Data Lapangan, Tahun 2009

Tabel 2. Tipologi Pesisir Kabupaten Bantul

Nama Pantai	Relief dan Material Penyusun	Proses Genesa	Tipologi Pantai	Penggunaan lahan	Potensi Kearifan Lokal
Parang-tritis dan Parang-kusumo	Datar-Landai, Pasir	Marine	Pesisir pengendapan material laut	Permukiman dan tempat wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upacara Labuhan Kraton Yogyakarta, Tiga Kali dalam setahun (Suro, Tingalan Dalem, Hadeging Nagari)</li> <li>• Upacara Labuhan Trah Honggodharmo (Trah Majapahit)</li> <li>• Upacara Sungsum Jaladri (Merti Laut)</li> <li>• Upacara Peh Cun dan Tahun Baru Cina</li> </ul>
Gumuk Pasir Aktif Parang-tritis	Datar-Landai, Pasir	Eolin	Gumuk pasir pengendapan material laut	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Lindung</li> </ul>
Pantai Depok	Datar, Pasir	Marine dan Fluviomarine	Pesisir pengendapan material Sungai Opak	Tempat pelelangan ikan, kampung nelayan, tempat wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upacara Merti Laut</li> <li>• Desa Wisata dan Desa Nelayan</li> </ul>
Pantai Samas	Datar-Landai, Pasir	Marine dan Sebagian Eolin	Pesisir Pengendapan material Sungai Opak	Tempat wisata, kampung nelayan, tegalan	
Pantai Kuwaru	Datar-Landai, Pasir	Marine dan sebagian Eolin	Beting gisik pengendapan material laut	Tempat wisata, pertanian lahan pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya Lahan Pesisir (Pertanian Buah Naga)</li> <li>• Tempat wisata baru</li> </ul>
Pantai Pandansimo dan Pandan Segegek	Datar-Landai, Pasir	Marine dan Sebagian Eolin	Beting gisik pengendapan material Sungai Progo	Tempat wisata spiritual dan pertanian lahan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obyek wisata religi</li> </ul>

nber: Data Lapangan, Tahun 2009

## Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Menurut Nikijuluw (1994) dalam Zamani dan Darmawan (2000), Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau *Community Based Management* (CBM) merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya di suatu tempat, dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya yang terkandung di dalamnya.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa penguasaan negara (Indonesia) atas sumberdaya, khususnya sumberdaya pesisir diarahkan untuk kemakmuran rakyat dan diupayakan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir. Kenyataan menunjukkan pola pengelolaan sumberdaya pesisir yang telah dilaksanakan bertentangan yang digariskan dalam pasal tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir masih bersifat “*top down*”. Semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal. Padahal jika melihat karakteristik wilayah pesisir, baik sumberdaya maupun masyarakatnya sangat kompleks. Oleh karena itu dalam pengelolaan wilayah pesisir harus melibatkan masyarakat lokal sehingga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir. Hal ini didukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberi kesempatan daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing.

Pengembangan masyarakat pesisir merupakan bagian integral dari pengelolaan sumberdaya pesisir, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Ada 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat pesisir (Nurmalasari, 2008), yaitu:

### 1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural bertujuan tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen

sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumberdaya pesisir dari berbagai ancaman. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1.1. Aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya pesisir

Aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya pesisir diharapkan dapat membantu masyarakat secara ekonomi dengan menikmati sumberdaya pesisir secara berkelanjutan (*sustainable*).

1.2. Aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah

Kebijakan yang dikembangkan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat diharapkan mampu menjamin keberhasilan pengelolaan sumberdaya pesisir. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pesisir. Selain itu adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu “kesejahteraan”.

1.3. Lembaga Pendukung dan Informasi

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir, diperlukan lembaga sosial untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayah pesisir dari kerusakan. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial diharapkan memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir.

Informasi merupakan aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumberdaya pesisir sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut.

1.4. Pengawasan Berbasis Masyarakat

Sistem pengawasan berbasis masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Sistem pengawasan tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumberdaya pesisir dan wilayah

tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).

## 2. Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek budaya yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya pesisir, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain:

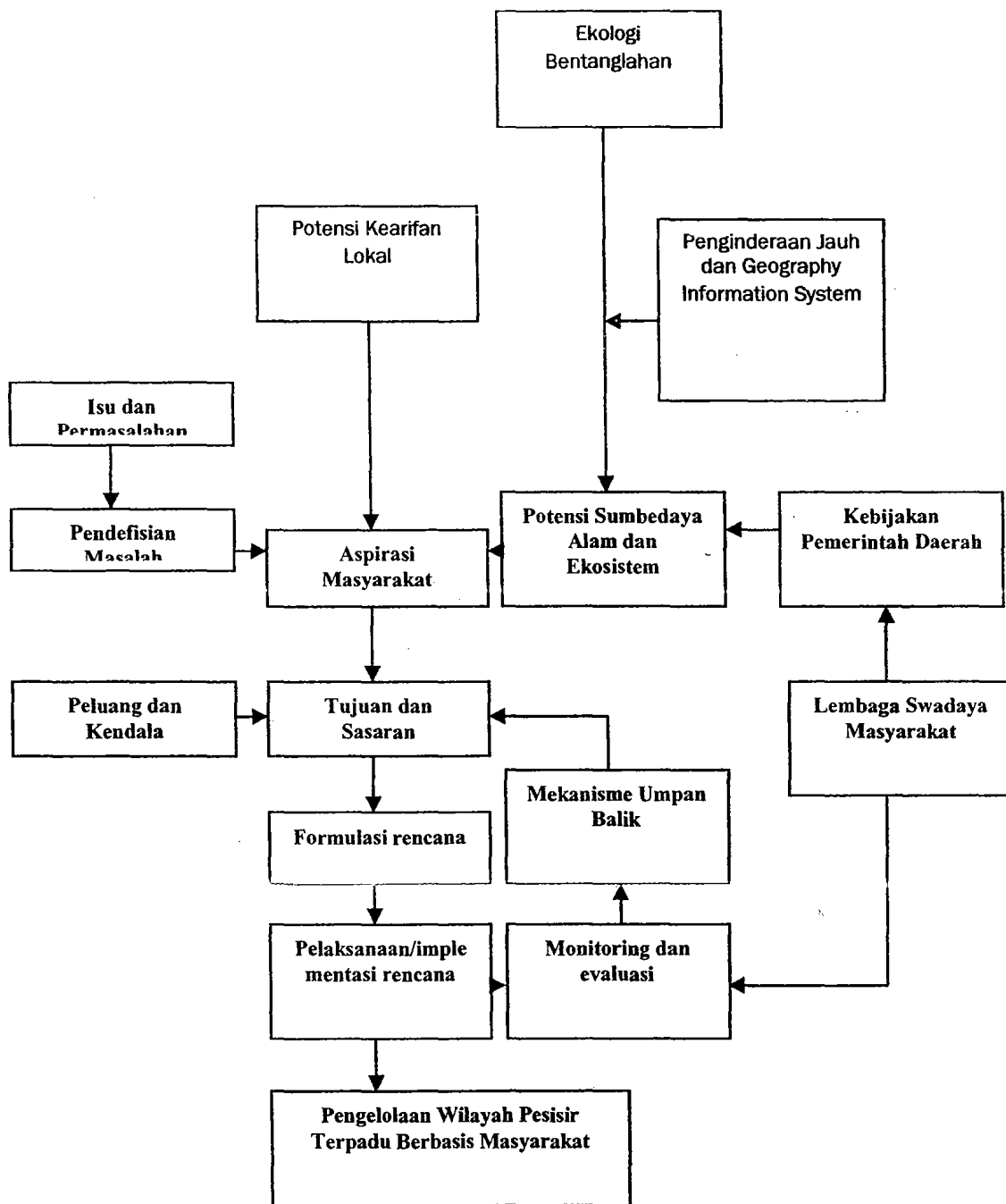
- 1) Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.
- 2) Pengembangan keterampilan masyarakat.
- 3) Pengembangan kapasitas masyarakat.

Potensi kearifan lokal yang berada di sepanjang pesisir Kabupaten Bantul merupakan sarana efektif untuk pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. Adanya wilayah kasultanan yang merupakan *Sultan Ground* mampu menahan laju kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan lahan pesisir oleh masyarakat.

Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terbukti efektif untuk menata kawasan wisata Parangtritis. Munculnya kawasan wisata baru "Pantai Kuwaru" dengan nuansa keteduhan membentuk pola pikir masyarakat yang baru, yaitu penghijauan kawasan pesisir kecuali Gumuk Pasir Parangtritis.

Upacara Labuhan, Sungsung Jaladri (merti laut) dan upacara yang lain yang berkaitan dengan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui karuniaNya lewat potensi laut mampu menghidupkan ruh kearifan terhadap alam. Manajerial terhadap sumberdaya alam semakin tertata dengan tidak mengesampingkan hal-hal budaya dan adat masyarakat setempat sebagai potensi kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Berikut ini disajikan skema proses pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, seperti gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (Dahuri et al., 2001 yang telah dimodifikasi)

### Kegiatan Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Kegiatan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan fisik, meliputi:
  - a. Rehabilitasi dan pelestarian ekosistem pesisir, misalnya: pembuatan papan himbauan dan penanaman pohon ketapang dan cemara udang.
  - b. Rehabilitasi prasarana lingkungan permukiman, misalnya: pembangunan dermaga, pembangunan tong tower air dan pembangunan MCK di tempat tujuan wisata.
  - c. Perbaikan/pembangunan bungalow atau tempat istirahat.
2. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan sosial dan budaya, meliputi:
  - a. Pembentukan lembaga sosial berupa paguyuban parkir, paguyuban guide, paguyuban pemilik penginapan, paguyuban pedagang, dan sebagainya.
  - b. Pembentukan lembaga budaya, berupa menghidupkan kembali kesenian local dan pembuatan even budaya yang berkaitan dengan budaya pesisir.

### Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan pesisir Kabupaten Bantul terbagi atas 5 (lima) ekosistem; yaitu Ekosistem Pesisir, Ekosistem Gumuk Pasir Aktif, Ekosistem Gumuk Pasir Pasif, Ekosistem Estuari, dan Ekosistem Rawa Belakang.
2. Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya pesisir, dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya yang terkandung di dalamnya.
3. Strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural bertujuan tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan di wilayah pesisir. Pendekatan kultural diupayakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat pesisir untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumberdaya pesisir.
4. Kegiatan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dapat diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan fisik dan kelembagaan sosial budaya.

## Daftar Pustaka

- Dahuri, R. et al. 1998. *Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang Berakar dari Masyarakat*. Kerjasama Ditjen Bangda dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB: Laporan Akhir.
- Dahuri, R., Rais Y., Putra S. G., Sitepu, M.J., 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kay, R. and J. Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. An Imprint of Routledge. London and New York.
- Khakhim, Nurul, dkk. 2008. *Analisis Preferensi Visual Lanskap Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Menuju Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan*. Forum Geografi. Volume 22. No. 1. Juli 2008: 44-59.
- Nurmalasari, Yessy. 2008. *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. Infoman's: Jurnal Ilmu-Ilmu Manajemen dan Informatika. Volume: 01. Nomor: 02. Bulan Maret 2008. ISSN: 1978-3310.
- Ongkosongo, O. 2004. *Perubahan Lingkungan di Wilayah Pesisir: Struktur Fisik dan Dinamik Pesisir*. Makalah Workshop: Deteksi, Mitigasi dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Indonesia
- Sugiharyanto, Dyah Respati, Nurul Khotimah. 2009. *Aplikasi Citra Landsat Untuk Mendeteksi Karakteristik Material Fluvio-marine di Kecamatan Kretek dan Sanden Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Worosuprojo, Suratman. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Geografi UGM.
- Zamani, N.P. dan Darmawan. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor 21 - 26 Februari 2000. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.